

**KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS LAPORAN
VARIETIES OF DEMOCRACY (V-DEM) INSTITUTE 2024**

Radians Krisna Febriandy¹, Umaimah Wahid²
Universitas Paramadina¹, Universitas Budi Luhur²
[radians.febriandy@students.pramadina.ac.id¹](mailto:radians.febriandy@students.pramadina.ac.id)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. **Penelitian ini** menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif pada laporan *V-Dem Institute 2024*. **Hasil penelitian** menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu; kebebasan berekspresi, kualitas pemilu dan dominasi kekuatan eksekutif terhadap lembaga lainnya. Laporan tersebut menjelaskan adanya tekanan yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi, manipulasi hasil pemilu dan campur tangan pemerintah terhadap lembaga yudisial. Kemunduran demokrasi juga memberikan dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Tantangan besar ini masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui kebijakan yang komprehensif dan partisipasi masyarakat luas. **Simpulan** penelitian ini bahwa faktor utama tantangan dalam demokrasi Indonesia fokus pada tiga area utama: kurangnya ekspresi, buruknya pendidikan, dan meningkatnya pengaruh eksekutif. Kritik media menyoroti manipulasi pendidikan dan intervensi pemerintah. Namun, reformasi diperlukan untuk meningkatkan demokrasi, termasuk partisipasi aktif dari kaum muda dan regulasi yang komprehensif.

Kata Kunci: Kemunduran Demokrasi, Kebebasan Sipil, Kualitas Pemilu, Dominasi Eksekutif, V-Dem Institute.

ABSTRACT

The purpose of this study is to see what factors cause the decline of democracy in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method in the V-Dem Institute 2024 report. The results of the study explain that there are 3 main factors causing the decline of democracy in Indonesia, namely; freedom of expression, election quality and the dominance of executive power over other institutions. The report explains that there is significant pressure on freedom of expression, manipulation of election results and government interference in judicial institutions. The decline of democracy also has a direct impact on social and economic stability in Indonesia. This major challenge still has the potential to be fixed through comprehensive policies and broad public participation. The conclusion of this study is that the main factors of challenges in Indonesian democracy focus on three main areas: lack of expression, poor education, and increasing executive influence. Media criticism highlights the manipulation of education and government intervention. However, reforms are needed to improve democracy, including active participation of young people and comprehensive regulations.

Keywords: *Democratic Backsliding, Civil Liberties, Election Quality, Executive Dominance, V-Dem Institute.*

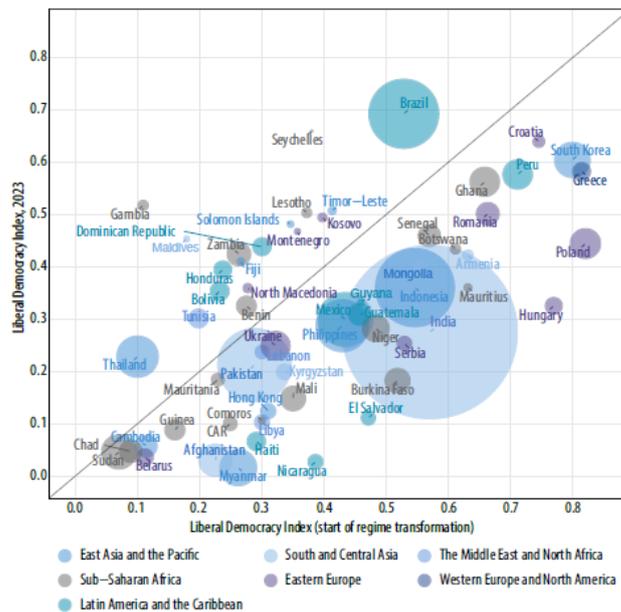
PENDAHULUAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Tren ini memberikan perhatian dunia yang cukup mengkhawatirkan, di mana banyak negara mengalami kesulitan besar dalam menjalankan sistem demokrasinya (Leininger, 2022). Penurunan ini menjadi lebih jelas ketika laporan demokrasi *V-Dem Institute* 2024 melabeli Indonesia sebagai negara otokrasi elektoral, mengalami pergeseran dari peringkat sebelumnya sebagai negara demokrasi elektoral. Menurunnya kebebasan berekspresi, degradasi kualitas pemilu, dan kontrol eksekutif yang semakin dominan terhadap penguatan lembaga-lembaga demokrasi menjadi latar belakang

terjadinya transisi ini (V-Dem Institute, 2024).

Menurunnya kebebasan sipil adalah salah satu tanda utama dari kejatuhan demokrasi Indonesia. Sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan berekspresi semakin tertekan karena pemerintah menerapkan kebijakan yang semakin ketat untuk membatasi kebebasan media dan memberangus suara-suara kritis (Repucci, 2021). Indonesia adalah salah satu contoh negara yang paling mencolok, meskipun bukan satu-satunya negara yang mengalami fenomena ini, tetapi juga mewakili tren yang terjadi di seluruh dunia di mana kebebasan sipil di banyak negara mengalami penurunan yang signifikan (Watch, 2023).

FIGURE 11. DEMOCRATIZERS VS. AUTOCRATIZERS, BY POPULATION SIZE, 2023



Gambar 1. Democratizers vs. Autocratizers, Berdasarkan Ukuran Populasi, 2023 (Sumber: Laporan *V-Dem Institute* 2024)

Selain itu, pemilu di Indonesia juga semakin tidak berkualitas. *V-Dem Institute* mengamati adanya beberapa klaim intervensi pemerintah dalam proses pemungutan suara dan penurunan yang signifikan dalam hal transparansi

dan keadilan pada pemilu sebelumnya (Angiolillo et al., 2024). Salah satu fondasi utama demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan adil; jadi, ketika salah satu pilar melemah, maka seluruh kerangka kerja demokrasi

akan terekspos (Norris, 2015). Setelah dianggap sebagai contoh cemerlang dari negara demokrasi yang sedang berkembang, Indonesia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kualitas pemilihannya masih jauh dari harapan (Power, 2020).

Meningkatnya kontrol eksekutif menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam kemunduran demokrasi di Indonesia. Dengan berkurangnya kapasitas lembaga negara seperti legislatif dan yudikatif yang seharusnya bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan, pemerintah justru semakin memperkuat kendalinya terhadap lembaga-lembaga tersebut (Levitsky 2018). Ketika lembaga-lembaga ini kehilangan kapasitasnya untuk bergerak secara independen, kekuasaan hanya akan cenderung kepada satu kepentingan, sehingga akan membahayakan kemampuan *check and balances* dalam demokrasi itu sendiri (Matlosa, 2023).

Situasi global hari ini di mana banyak negara mengalami fenomena yang sama membuat kita tidak bisa memisahkan kemunduran demokrasi di Indonesia dengan negara lain. Fenomena utama dalam sepuluh tahun terakhir adalah autokratisasi, yaitu proses di mana negara-negara yang tadinya demokratis menjadi negara otokrasi (Boese et al., 2022). Pada awalnya Indonesia dianggap sebagai model demokrasi di Asia Tenggara, tetapi akhir-akhir ini justru ikut dengan tren dunia yang mengkhawatirkan ini (Diamond, 2015).

Kemunduran demokrasi juga berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk hak asasi manusia, kebebasan pers, dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik (Razita, 2024). Dampaknya tidak hanya dirasakan di bidang politik. Kebebasan pers di Indonesia telah

menurun drastis seiring dengan meningkatnya beberapa insiden intimidasi terhadap wartawan dan pembatasan terhadap pers (Reliefweb, 2023). Penurunan kebebasan pers ini memengaruhi kualitas informasi yang didapat masyarakat, sehingga merusak kapasitas masyarakat untuk membuat penilaian politik yang bijak (Power, 2020).

Dampak selanjutnya dari kemunduran demokrasi adalah stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Kebebasan sipil dan politik yang terbatas meningkatkan kemungkinan konflik sosial karena kelompok-kelompok yang merasa dikucilkan akan mencari cara lain untuk mengekspresikan ketidakbahagiaan mereka (Altmeyer, 2010). Dalam jangka panjang kemunduran demokrasi ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi, karena para investor biasanya menghindari negara-negara yang tidak stabil secara politik (Fukuyama, 2014).

Masih ada harapan untuk masa depan demokrasi di Indonesia agar mampu keluar dari situasi yang mengkhawatirkan ini. Elemen-elemen masyarakat sipil terus berjuang untuk melindungi dan membangun kembali nilai-nilai demokrasi (Heryanto, 2005). Peran masyarakat harus terus berusaha mendorong partisipasi politik yang lebih terbuka dan inklusif (Altmeyer, 2010). Gerakan ini memberikan optimisme bahwa demokrasi di Indonesia masih dapat terus ditingkatkan, dengan upaya yang berkesinambungan dan dukungan dari seluruh dunia (Levitsky, 2018).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia serta konsekuensinya bagi masa depan. Selain itu, akan dibahas pula tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi fenomena ini dan

memulihkan kembali demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kualitas demokrasi (Creswell, 2018). Data primer berasal dari Laporan Indeks Demokrasi 2024 yang diterbitkan oleh V-Dem Institute, laporan tersebut mencakup berbagai indikator penilaian demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kualitas pemilu, dan dominasi kontrol eksekutif (V-Dem Institute, 2024). Data sekunder diambil dari informasi dan data yang relevan dengan penelitian ini seperti, buku, artikel, dan penelusuran melalui internet.

Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan generalisasi yang berlebihan (Sandelowski, 2000). Fokus utama dari analisis deskriptif ini adalah untuk menggambarkan situasi yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terhadap penurunan demokrasi di Indonesia (Lambert, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu; kebebasan berekspresi, kualitas pemilu, dan dominasi kontrol eksekutif. Temuan ini didasarkan pada analisis data yang diambil dari Laporan Demokrasi 2024 oleh *V-Dem Institute* serta berbagai sumber sekunder lainnya.

Kebebasan Berekspresi

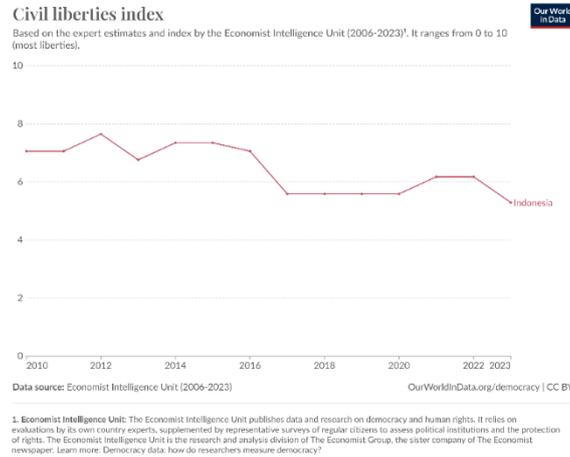
Menurunnya kebebasan berekspresi berdampak secara signifikan terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Pemerintah secara bertahap melemahkan dasar kebebasan berekspresi melalui banyak undang-undang yang membatasi media dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara sepihak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan beberapa tokoh yang dianggap menghina atau menyebarkan informasi yang merugikan pihak penguasa (Repucci, 2021). Peristiwa ini menyoroti bagaimana kebebasan berekspresi yang tadinya cukup baik di Indonesia kini terancam ketika kelompok masyarakat atau individu berusaha menyuarakan pendapat (kritik) tetapi justru malah dihadapkan dengan risiko hukum di depan mata.

Penelitian Human Rights Watch (2023) juga menjelaskan meningkatnya pembatasan media dan intimidasi terhadap wartawan. Di beberapa tempat, wartawan yang melaporkan topik-topik sensitif seperti korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia diancam atau diintimidasi secara fisik. Kontrol yang ketat dan tekanan politik membuat media massa-baik tradisional maupun digital-semakin berada di bawah pengaruh, sehingga mengancam independensinya. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat, yang dapat memengaruhi kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dan memahami proses politik.

Kemerosotan kebebasan berekspresi di Indonesia mencerminkan tren yang lebih umum di mana banyak negara lain juga mengalami penurunan yang sama. Sekitar 35% negara di dunia mengalami penurunan kebebasan

berekspresi menurut laporan Freedom House (2023). Biasanya fenomena ini disertai dengan meningkatnya otoritarianisme, di mana pemerintah menggunakan berbagai perangkat dan

kekuasaannya untuk membatasi hak-hak sipil dan mempertahankan kekuasaan mereka.

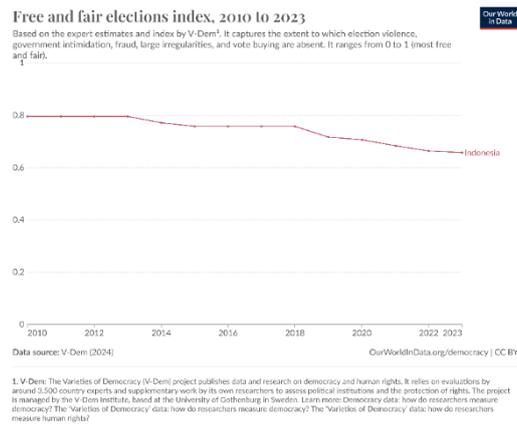


Gambar 2. Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia (2010-2023)
(Sumber: <https://ourworldindata.org/>)

Meskipun Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu negara demokrasi yang paling aktif di Asia Tenggara, kemunduran dalam kebebasan berekspresi ini menunjukkan adanya perubahan menuju rezim yang lebih otoriter. Perubahan ini mempengaruhi seluruh kerangka politik dan sosio-ekonomi negara serta masyarakat sipil. Jika kecenderungan ini tidak dilawan, Indonesia menghadapi risiko menyaksikan lebih banyak lagi kemerosotan dalam kualitas demokrasi, sehingga membahayakan stabilitas politik dan sosial negara.

Kualitas Pemilihan Umum

Sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu negara paling progresif di antara negara-negara demokrasi yang baru, kualitas pemilu di Indonesia sekarang mengalami penurunan yang signifikan. *V-Dem Institute* (2024) melaporkan adanya manipulasi pada pemungutan suara, intimidasi pemilih, dan intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam proses pemilu telah mempengaruhi pemilu Indonesia, terutama pemilu beberapa tahun terakhir dengan berbagai macam masalah.



Gambar 3. Indeks Pemilu Bebas & Adil di Indonesia (2010-2023)
 (Sumber: <https://ourworldindata.org/>)

Di antara indikator utama kemunduran ini adalah meningkatnya jumlah laporan ketidaksesuaian dalam daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, pelaksanaan pemilu yang buruk, hingga penghitungan suara yang meragukan. Manipulasi suara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, telah menjadi isu yang sangat besar di setiap pemilu di Indonesia (Angiolillo et al., 2024). Beberapa penelitian, terutama di daerah-daerah yang kurang terpantau oleh media dan pengawas pemilu independen, mengindikasikan bahwa praktik-praktik seperti politik uang dan jual beli suara masih sering terjadi di masyarakat (Power, 2020).

Menurunnya kualitas pemilu juga menunjukkan menurunnya kebebasan bagi partai oposisi dan kandidat independen untuk berpartisipasi secara adil dalam pemilu. Terkadang partai-partai oposisi menghadapi berbagai hambatan hukum dan administratif yang dirancang untuk mengurangi peluang mereka untuk terpilih. Selain itu, salah satu taktik yang digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu adalah intimidasi pemilih, terutama di daerah-daerah yang pernah mengalami konflik politik (Norris, 2015).

Masalah ini lambat laun akan mengikis kepercayaan publik terhadap keabsahan hasil pemilu dan juga pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu tidak lagi adil dan transparan, partisipasi mereka dalam politik biasanya ikut menurun dan mereka menjadi lebih apatis atau bahkan sinis terhadap sistem politik yang ada.

Indonesia yang pernah dianggap sebagai model bagi negara-negara demokrasi yang baru lahir di Asia, harus menghadapi kenyataan bahwa kualitas pemilihan umum telah menurun hingga ke titik di mana integritas dan transparansi proses pemilihan umum diragukan. Ketidakpuasan masyarakat yang lebih jauh sebagai akibat dari hal ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko jatuh ke dalam kediktatoran, di mana pemilu hanya menjadi formalitas yang tidak memiliki inti dari demokrasi yang sesungguhnya.

Dominasi Kontrol Eksekutif

Faktor ketiga yang sangat berpengaruh terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia adalah meningkatnya dominasi kontrol eksekutif. Otoritas eksekutif di Indonesia, yang sangat tersentralisasi

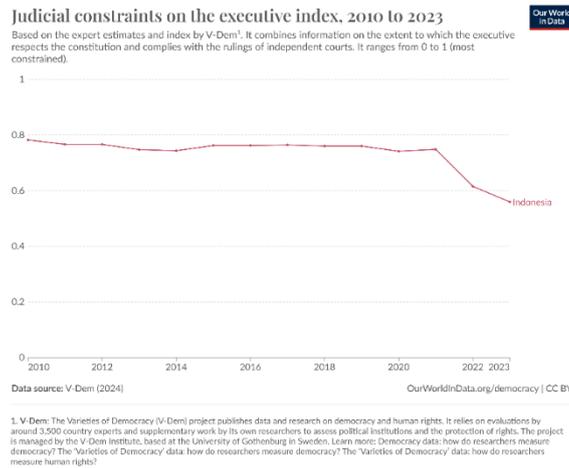
pada presiden dan lembaga-lembaga yang berada di bawah kendalinya, semakin menguat belakangan. Pemerintah berupaya untuk menundukkan dan mendiskreditkan lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, dan komisi-komisi independen.

Upaya pemerintah untuk mempengaruhi pencalonan dan pemecatan anggota di lembaga-lembaga penting seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan jelas menunjukkan bagaimana dominasi kontrol eksekutif semakin menguat. Pemilihan pejabat yang loyal kepada pemerintah di pos-pos penting ini telah mengakibatkan hilangnya independensi lembaga-lembaga tersebut, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas mereka dalam menjalankan peran pengawasan terhadap pemerintah (Levitsky, 2018).

Bukti bahwa pemerintah mengintervensi lembaga legislatif adalah dengan gemuknya koalisi partai-partai yang didukung oleh pemerintah selama proses legislasi. Beberapa

undang-undang yang kontroversial disahkan dengan cepat tanpa diskusi publik atau interaksi yang cukup dengan beberapa pihak. Contoh lainnya adalah perubahan UU KPK yang menuai kritik karena dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. Cara ini menunjukkan bagaimana otoritas pemerintah digunakan untuk upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus membatasi fungsi check and balances, yang merupakan hal dasar dalam pemerintahan yang demokratis (Matlosa, 2023).

Penggunaan aparat keamanan dan hukum untuk menekan oposisi dan suara-suara kritis juga menjadi penyebab peningkatan dominasi kontrol eksekutif. Dengan dalih melanggar hukum atau membahayakan keamanan negara, penangkapan aktivis, reporter, atau tokoh masyarakat yang vokal menyuarakan kebijakan pemerintah semakin sering terjadi. Masalah ini memicu ketidakpastian dan kecemasan pada masyarakat dalam partisipasi politik dan kebebasan berekspresi (Boese et al., 2022).



Gambar 4. Indeks Batasan Yudisial dengan Eksekutif di Indonesia (2010-2023)
(Sumber: <https://ourworldindata.org/>)

Dominasi kontrol eksekutif yang semakin besar membahayakan nilai-nilai demokrasi yang mendasar, di mana kekuasaan seharusnya didistribusikan di

bawah pengawasan beberapa organisasi independen. Sentralisasi kekuasaan pada satu pihak tanpa sistem kontrol yang transparan dapat meningkatkan

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sehingga membahayakan legitimasi pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Hal ini dapat memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan, sehingga menghambat pertumbuhan demokrasi yang berkelanjutan dan sehat.

Dampak Sosial dan Ekonomi Kemunduran Demokrasi

Kemunduran demokrasi juga sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Kebebasan berekspresi dan politik yang terus dibatasi meningkatkan kemungkinan konflik sosial di masyarakat, turun ke jalan menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan penolakan mereka. Sebagai contoh, ketika demonstrasi untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau menuntut hak-hak sipil, masyarakat sering mendapatkan tindakan yang bersifat represif yang akibatnya hanya meningkatkan kebencian masyarakat (Altmeyer, 2010).

Konsekuensi mundurnya demokrasi memberikan efek negatif pada pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Biasanya, investor menjauhi negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik atau di mana aturan utamanya berubah-ubah (inkonsisten) alias sesuai dengan kepentingan yang sedang menjabat. Ambiguitas ini dari waktu ke waktu dapat menghambat investasi dari luar, mengurangi lapangan kerja, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Fukuyama, 2014).

Kemunduran demokrasi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi di Indonesia. Ketika proses politik secara bertahap berada di bawah kendali kelompok elit yang memiliki akses langsung ke kekuasaan, kebijakan publik biasanya hanya

melayani kepentingan mereka; kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas seakan terabaikan. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga memicu gangguan sosial lainnya (Heryanto, 2005).

Oleh karena itu, demokrasi yang baik bukan hanya tentang pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga tentang pembentukan prosedur yang efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Lebih jauh lagi, sistem ini rentan dirusak ketika demokrasi berusaha dikompromikan, sehingga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Harapan dan Tantangan untuk Pemulihan Demokrasi

Demokrasi Indonesia memang mengalami banyak kesulitan, tetapi peneliti meyakini masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi ini. Sebagai penjaga pilar dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi di Indonesia, organisasi masyarakat dan masyarakat sipil terus bekerja untuk melawan ke sewenangan otoritarianisme dan memajukan partisipasi politik yang inklusif dan terbuka (Altmeyer, 2010). Gerakan-gerakan ini memberikan optimisme bahwa demokrasi di Indonesia masih dapat dibangun kembali dan dikembangkan dengan dukungan besar dari masyarakat dan komunitas dunia.

Upaya untuk keluar dari kemunduran demokrasi di Indonesia bukanlah hal mudah. Dengan perangkat kekuasaannya, pemerintah mungkin akan menentang keras inisiatif apa saja untuk menguatkan kembali lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil. Peneliti mengajak baik

melalui pendidikan, advokasi, lembaga masyarakat, partai politik atau kepada semua pihak yang peduli dengan masa depan demokrasi di Indonesia harus bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini ke depan (Levitsky, 2018).

Reformasi pada Undang-Undang Pemilu dan kebijakan yang menjamin kebebasan sipil merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan segera. Ditambah juga dengan memperkuat sistem pemantauan pemilu, melindungi media dan kebebasan berekspresi, serta membatasi kewenangan pemerintah agar tidak terlalu kuat dalam proses politik harus menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. Indonesia menghadapi bahaya untuk terus meluncur ke dalam pemerintahan otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi, apabila tidak melakukan perubahan yang serius dan komprehensif.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, yang sebagian besar diakibatkan oleh tiga hal utama; kebebasan berekspresi yang semakin terbatas, kualitas pemilu yang menurun, dan meningkatnya pengaruh eksekutif terhadap lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Aturan yang ketat terhadap media dan kritik publik jelas menunjukkan adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi; sementara itu, manipulasi pemilu dan intervensi pemerintah dalam proses pemilu mengikis kepercayaan masyarakat. Lebih jauh lagi, otoritas pemerintah yang terlalu kuat telah merusak konsep check and balances yang diperlukan untuk pemerintahan demokratis yang baik.

Namun, masih ada peluang untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan reformasi menyeluruh termasuk perlindungan terhadap kebebasan sipil dan penguatan lembaga-lembaga

demokratis. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas demokrasinya dengan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan perubahan regulasi yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Altmeyer, V., Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). Book Review: Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(3), 152-154.
<https://doi.org/10.1177/1868103410002900310>
- Angiolillo, F., Lundstedt, M., Nord, M., & Lindberg, S. I. (2024). State of the world 2023: democracy winning and losing at the ballot. *Democratization*, 1–25.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2341435>
- Boese, V. A., Lundstedt, M., Morrison, K., Sato, Y., & Lindberg, S. I. (2022). State of The World 2021: Autocratization Changing Its Nature? *Democratization*, 29(6), 983–1013.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2069751>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Diamond, L. (2015). Democracy in Decline? In Johns Hopkins University Press eBooks.
<https://doi.org/10.1353/book.40891>
- Fukuyama, F. (2014). *Political Order and Political Decay*. Macmillan.
- Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-Authoritarian Indonesia: A Comparative Southeast Asian Perspective. *Critical Asian Studies*, 37(2), 251–275.

- <https://doi.org/10.1080/14672710500106341>
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2013). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16(4), 255–256. Retrieved from <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/5805>
- Leininger, J. (2022). International Democracy Promotion In Times of Autocratization: From Supporting to Protecting Democracy (IDOS Discussion Paper 21/2022). *Bonn: German Institute of Development and Sustainability (IDOS)*. <https://doi.org/10.23661/idp21.2022>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Broadway Books.
- Matlosa, K. (2023). Global Trends and Impact of Democratic Recession: Hard Choices for the Global South. *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 337–355. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2269149>
- Norris, P. (2015). *Why Elections Fail: Global Challenges and the Deterioration of Democratic Norms*. Oxford University Press.
- Power, T., & Warburton, E. (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Razita, S., & Panji Teguh Santoso, M. (2024). The Decline of Democracy in The South East Asian Region. *Politics and Humanism*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.31947/jph.v3i1.35380>
- Reliefweb. (3 May 2023). World Press Freedom Index 2023. Reporters Without Borders. Retrieved from https://reliefweb.int/report/world/2023-world-press-freedom-index-journalism-threatened-fake-content-industry-enru?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw_4S3BhAAEiwA_64YhgY6vbHU7e5HWBLqPxEqzZRh237BeYxlTdatMLGnyoayEUYEktPLaxoCZpkQAvD_BwE
- Repucci, S., & Slipowitz, A. (2021). Democracy Under Siege. Freedom in the World 2021. Retrieved from https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-03/FIW2021_Abridged_03112021_FINAL.pdf
- Sandelowski M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334-340. [https://doi.org/10.1002/1098-240x\(200008\)23:4<334:aid-nur9>3.0.co;2-g](https://doi.org/10.1002/1098-240x(200008)23:4<334:aid-nur9>3.0.co;2-g)
- V-Dem Institute. (2024). Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot. University of Gothenburg: V-Dem Institute. <https://v-dem.net/publications/democracy-reports/>
- Watch, H. R. (2023). *World Report 2023*. Seven Stories Press.